

## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH

Alvi Angelica Tabupook<sup>1</sup>; Ika Wulandari<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Mercubuana, Yogyakarta<sup>1,2</sup>

Email : alviangelica110@gmail.com<sup>1</sup>; ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah dan output yang menunjukkan kinerja selama periode berjalan. Tujuan riset dilakukan untuk mengetahui hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Kumpulan data dengan cara memberikan kuesioner kepada sampel sekaligus populasi yang berjumlah 70 karyawan bagian keuangan di BPKAD. Regresi linear berganda merupakan metode yang dimanfaatkan untuk menjawab hipotesis riset. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan variabel independent yang tinggi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara parsial. Selain itu, laporan keuangan berkualitas tinggi sangat dipengaruhi oleh good governance. Impact penelitian ini adalah memberikan informasi kepada Pemda setempat bahwa perlu adanya implementasi SAP yang baik serta penerapan prinsip good governance untuk mencapai output laporan keuangan yang berkualitas.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan; Good Governance; Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

### ABSTRACT

*The quality of financial reports is one of the important aspects as a form of government accountability and output that shows performance during the current period. This study aims to measure how much influence the implementation of Government Accounting Standards (SAP) and Good Governance has on the quality of financial reports of the Central Sulawesi regional government. Data were collected by distributing questionnaires to samples and populations totaling 70 employees in the finance department at BPKAD. Multiple linear regression analysis methods were used to analyze data and examine hypotheses. The results of the study indicate that the application of independent variables will partially affect the quality of financial reports. In addition, high-quality financial reports are greatly influenced by good governance. The impact of this study is to provide information to the local government that there needs to be a good implementation of SAP and the application of the principle of good governance to achieve quality financial report output.*

*Keywords : Government Accounting Standards; Good Governance; Quality of Government Financial Statements*

### PENDAHULUAN

Penerapan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah (Pemda) sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang

transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Zeny Antika, Yunika Murdayanti, and Hafifah Nasution 2020). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, karena dapat membantu untuk memastikan bahwa tindakan atau kinerja yang dilakukan telah memenuhi harapan atau tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan ternasuk dalam konteks pengelolaan organisasi. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan dan legitimasi terhadap organisasi atau lembaga akan menurun, sehingga dapat menghambat pembangunan dan kemajuan. Akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan anggaran publik untuk kepentingan bersama. Hal ini membuat masyarakat semakin menginginkan keterbukaan, terutama dalam pengelolaan dana publik sebagai pertanggungjawaban dengan memberikan akses informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja birokrasi. Sebaliknya, akuntabilitas memberikan insentif bagi institusi untuk menjadi lebih transparan terkait dengan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, transparansi menciptakan landasan bagi akuntabilitas, sementara akuntabilitas memperkuat pentingnya transparansi dalam menjaga kewajaran dan integritas, sehingga pemerintah harus menyajikan informasi keuangan yang transparan dan mudah dipahami (Junyantara and Putra 2021).

Proses pengambilan keputusan pada pemerintah akan diawali adanya perencanaan dan diikuti dengan pengawasan merupakan setelah melihat laporan keuangan. Laporan keuangan ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat, memantau anggaran, dan menilai apakah sumber daya digunakan sesuai rencana. Pemerintah Indonesia mendukung hal ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi global. Melalui laporan keuangan yang menjadi output kegiatan yang transparan dan akurat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, serta tercipta tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Menurut penelitian (Firmansyah, Yuniar, and Arfiansyah 2022) Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi ketika nilai informasinya melebihi biaya penyusunannya. Kualitas ini tercermin dari kemampuan laporan tersebut untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif.

Penerapan SAP memainkan peran penting dalam membentuk output laporan keuangan pemerintah yang bermutu, hal ini karena SAP merupakan standar yang

digunakan sebagai dasar dalam proses pembukuan Pemda dilakukan. Menurut (Utama 2021) mengungkapkan bahwa penerapan SAP berkontribusi signifikan dalam mewujudkan laporan keuangan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai studi ilmiah telah membuktikan adanya pengaruh positif pada penerapan SAP terhadap mutu kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan (Rahmah Muthia 2018) penerapan SAP di kota makassar menunjukkan hasil yang signifikan dalam kualitas laporannya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa standar akuntansi pemerintahan berperan sebagai instrumen yang efisien dalam menghasilkan dan menyampaikan informasi keuangan dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi, akuntabel, dan dapat diandalkan di Tingkat pemerintahan daerah.

Penerapan Good Governance memiliki peran yang sangat penting dalam membangun mutu laporan keuangan daerah. Beberapa penelitian mendukung hal ini, seperti (Philadelphina, Suryaningrum, and Sriyono 2020) mengungkapkan bahwa good governance memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil mutu laporan keuangan daerah, hal ini karena pembuatan laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip good governance yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Good governance berfungsi sebagai landasan penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Menurut (Sari 2022) menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan public untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemda. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan bersih, tanpa praktik korupsi maupun fraud, diharapkan akan tercipta peningkatan kualitas pelayanan publik serta laporan keuangan daerah yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

Riset tentang kualitas laporan keuangan sudah banyak dilakukan, namun masih sedikit yang mengambil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai objek studi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan instansi yang beroperasi di wilayah kabupaten yang relatif kecil. Hal ini dapat berdampak pada potensi kerugian negara yang signifikan. Dengan fokus pada BPKAD, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah tersebut, serta bagaimana kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya publik. Fenomena pada penelitian ini telah terjadi kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Tindakan korupsi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan anggaran daerah tahun 2019 telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, yaitu sebesar Rp 29 miliar (Asnawi Zikri 2022). Selain mantan Kepala BPKAD, tersangka lainnya adalah direktur CV UL. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2023 setelah mantan Kepala BPKAD ditangkap setelah menjadi buronan selama 19 bulan. Kasus korupsi ini menjadi simbol dari betapa pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, dan kurangnya kontribusi langsung dari Penerapan SAP dan Penerapan Good Governance. Beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan (Lantu, Pangkey, and Sumampouw 2023) secara parsial mengungkapkan bahwa penerapan SAP memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Minahasa Utara. Hasil ini selaras dengan riset (Gustina et al. 2022) yang mengungkapkan bahwa penerapan SAP akan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur sehingga membuat laporan keuangan Pemda berkualitas karena mampu menyampaikan laporan keuangan yang mudah dipahami serta bersifat wajar. Penelitian yang dilakukan (Advia, Wibowo, and Diarsyad 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa instansi menerapkan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab menjadikan good governance mampu membuat laporan keuangan yang lebih akurat sehingga menunjukkan output bermutu pada Pemda Kota Palangka Raya. Hasil penelitian (Maramis, Morasa, and Wokas 2018) menghasilkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas maka akan memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan yang tepat sehingga akan membentuk good governance menjadi langkah tepat untuk meningkatkan laporan keuangan Pemerintah Kota Manado lebih berkualitas. Sehingga, laporan keuangan yang berkualitas menjadikan proses penganggaran menjadi lebih cepat.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan kualitas output laporan keuangan sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh penerapan SAP dan good dovernance terhadap mutu laporan keuangan yang dibuat pada Pemda Kota di Sulawesi Tengah. Dengan adanya riset yang dilakukan ini diharapkan mampu membawa pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk pemda setempat dalam melakukan pemerintahan menjadi lebih baik

dan menjalani proses dan memandu para pegawai dalam berperan aktif mewujudkan tata kelola yang baik.

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Menurut (Jensen and Meckling 1976), teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak agen yang memiliki hubungan yang diatur dalam kontrak di mana agen ditunjuk oleh satu atau lebih pihak (principal) untuk bertindak atas nama mereka. Dalam kontrak tersebut, untuk kepentingan principal agen diberi wewenang dalam mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya pihak principal akan menuntut agen untuk memberikan output berupa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan.

SAP dan mutu laporan keuangan Pemda yang berkualitas ini dapat dianalisis melalui perspektif teori agensi. Dalam konteks tersebut, pemerintah yang sebagai agen diberikan mandat oleh prinsipal untuk memenuhi kewajibannya membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi diatur dalam SAP sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti ketentuan tersebut, menunjukkan laporan keuangan telah sesuai dengan standar sehingga dapat dibaca dan diidentifikasi oleh masyarakat dan para stakeholder sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, mutu laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah bentuk indikator yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas karena telah sesuai dengan prinsip kewajaran. Sehingga, laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat dilakukan dengan penyusunan proses ini dengan mematuhi prosedur yang diatur dalam SAP. Sejalan dengan riset tersebut (Munggaran et al. 2020) dan (Ramadhan and Fahrani 2024) menunjukkan terdapat hasil positif terkait dengan pengaplikasian SAP terhadap laporan keuangan yang berkualitas, karena dengan pengaplikasian standarisasi pembuatan output menjadikan laporan anggaran pemerintah menjadi lebih akuntabel.

H1: Pengaruh Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD

Hubungan antara pengaplikasian Good Governance akan membuat laporan keuangan Pemda menjadi lebih berkualitas. Hubungan dalam penelitian ini dapat dipahami melalui teori agensi. Dalam konteks ini, good governance memungkinkan pemerintah sebagai agen untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan transparan

kepada publik. Ketika terjalin komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintah daerah sebagai penyedia informasi keuangan dan pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (prinsipal), penerapan prinsip good governance dalam sebuah pemerintahan akan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan berfungsi sebagai acuan bagi lembaga pemerintah dalam mencapai kinerja yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Penerapan good governance juga berkontribusi pada pengorganisasian yang lebih efektif dari kinerja pegawai di sektor keuangan sehingga menjadikan proses pembuatan output laporan anggaran menjadi lebih berkualitas. Penelitian oleh (Junyantara and Putra 2021) serta (Philadelphina, Suryaningrum, and Sriyono 2020) mendukung temuan ini, dengan membuktikan good governance berkontribusi positif terhadap laporan keuangan yang berkualitas. Dengan meningkatnya penerapan good governance menjadikan proses penyusunan anggaran berkualitas dapat dilaksanakan dengan efisien.

H2: Pengaruh Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD:

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan menunjukkan besar pengaruh variabel independent terhadap dependen. Sampel yang diambil adalah pegawai bagian keuangan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik sampel jenuh. Dalam mengumpulkan data, dilakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai sub bagian keuangan sebagai responden. Selanjutnya, data akan dikumpulkan dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dimengerti.

Penelitian ini berfokus terhadap pemahaman terkait dengan SAP sebagai dasar dalam proses penyusunan laporan anggaran yang dilakukan sesuai pemahaman dalam prosedur penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah output berupa laporan yang disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut serta disesuaikan dengan prosedur standar akuntansi yang telah dirumuskan dengan harapan dapat dibaca oleh berbagai kalangan sesuai dengan tujuan dibuatnya

laporan tersebut. Laporan keuangan Pemda ini merupakan proses hasil pencatatan penggunaan anggaran, identifikasi, pengukuran dan penggunaan dalam satu periode yang diberikan sebagai wujud output kinerja yang telah dilakukan dalam suatu entitas di pemerintahan.

SAP memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan anggaran Pemda. SAP merujuk pada prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan presentasi laporan keuangan pemerintah, didasarkan atas regulasi, sistem, dan sumber daya manusia. Good governance merupakan landasan penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan, kuesioner riset diukur menggunakan skala Likert dengan skor dari 1 hingga 4. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mencakup pengujian validitas dan reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis, termasuk analisis regresi linier berganda dan uji t. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Proses analisis data didukung oleh program SPSS yang digunakan sebagai alat bantu.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

Riset ini diperoleh berdasarkan hasil penyebaran angket terhadap 70 pegawai di BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai responden. Responden memiliki karakteristik yang beragam, mencakup usia, jenis kelamin, jenjang Pendidikan terakhir, serta berapa lama bekerja. Uji validitas diterapkan untuk mengetahui kualitas item pengukuran yang digunakan dalam penelitian yang dikaitkan dengan variabel SAP, good governance, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji tersebut ditemukan bahwa setiap instrument yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang melebihi 0,339 ketika dibandingkan dengan skor total dari item-item pernyataan dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini berarti setiap pernyataan dalam instrument valid dan dapat digunakan untuk mengukur variable.

Selain itu, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi alat ukur. Dari hasil uji reliabilitas, semua instrument penelitian terbukti memiliki koefisien Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Dengan nilai reliabilitas yang tinggi ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh variable dalam penelitian memenuhi syarat reliabilitas atau keandalan. Ini berarti instrument tersebut cukup kuat dan konsisten untuk digunakan

dalam penelitian lebih lanjut, sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang akurat dan valid.

### **Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Berdasarkan hasil table 1 uji statistic deskriptif, yang diukur menggunakan 4 pernyataan dengan menggunakan skala likert 4 poin. Pada variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) menunjukkan nilai rendah yakni 14 dan nilai tinggi yakni 28. Rata-rata dari nilai standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 24,700, dengan standar deviasi sebesar 3,307. Artinya, nilai standar deviasi < deviasi rata-rata, yang menunjukkan bahwa penyebaran data terkait standar akuntansi pemerintahan relatif merata dan tidak terlalu bervariasi dari rata-rata. Dengan kata lain, sebagai responden menunjukkan pemahaman atau penerapan standar akuntansi pemerintahan yang cenderung konsisten dan berada di sekitar nilai rata-rata. Variabel good governance (X2) menunjukkan nilai rendah yakni 12 dan nilai tinggi yakni 24. Nilai good governance rata-rata adalah 20,528, dengan standar deviasi sebesar 3,067. Artinya, nilai standar deviasi ini lebih rendah daripada rata-rata, yang menunjukkan bahwa penyebaran data terkait good governance relatif merata dan tidak terlalu bervariasi dari rata-rata. Dengan kata lain, sebagai besar responden menunjukkan penerapan good governance yang cenderung konsisten dan berada di sekitar nilai rata-rata. Serta variabel Y menunjukkan nilai rendah yakni 14 dan nilai tinggi yakni 28. Nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah rata-rata sebesar 24,014, dengan standar deviasi 3,685. Artinya, nilai standar deviasi ini lebih rendah daripada rata-rata, yang membuktikan bahwa penyebaran data kualitas laporan keuangan pemerintah relatif merata dan tidak terlalu bervariasi dari rata-rata. Dengan kata lain, sebagai besar responden menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang cenderung konsisten dan berada di sekitar nilai rata-rata.

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji normalitas mampu mencerminkan adanya distribusi normal dalam data sebuah riset. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebaran data untuk model regresi setiap variabel yang digunakan telah memenuhi persyaratan asumsi normalitas yang mengindikasikan bahwa model regresi dapat memberikan hasil yang akurat dan tidak bias. Dari hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas dalam model. Dengan kata lain,

variabel-variabel independen yang digunakan dalam analisis tidak menunjukkan gejala saling ketergantungan yang signifikan. Pada variabel independen (SAP dan Good Governance) tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain. Dengan demikian, masing-masing variabel independen dapat secara efektif memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah tanpa adanya pengaruh saling tumpang tindih yang signifikan. Dari hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki varians residual yang konstan. Yang berarti, tidak terdeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model, dan menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi. Ini berarti bahwa varians error dalam model bersifat konstan dan tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen, sehingga model ini dapat diandalkan dalam memprediksi hubungan antara variabel tanpa adanya pola penyimpangan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, model regresi ini memenuhi semua uji asumsi klasik yang diperlukan, sehingga model ini layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa hasil yang diperoleh akan akurat dan dapat diandalkan.

### **Hasil Uji Hipotesis**

Berdasarkan hasil tabel 2 uji hipotesis menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  $Kualitas\ LKP = 2,438 + 0,622\ SAP + 0,303\ GG + e$ . Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) = memiliki koefisien B sebesar 0,622, menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam SAP, dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan nilai 0,622. Sementara itu, Good Governance (GG) = memiliki koefisien B sebesar 0,303, berarti setiap perbaikan dalam Good Governance, dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pemerintah dengan nilai 0,303.

Hasil pengujian memperlihatkan pengaruh positif dari implementasi SAP terhadap mutu Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Hal ini mendukung hipotesis satu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi dan sesuai SAP dalam pembuatan output anggaran yang dibuat maka semakin berkualitas LKP yang ditampilkan. Sehingga, ketika output keuangan pemerintah disesuaikan dengan SAP, maka semakin berkualitas laporan tersebut. SAP akan merumuskan akurasi data, efisiensi waktu, serta memberikan kemudahan dalam menganalisis transaksi keuangan menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder laporan keuangan

daerah digunakan untuk menunjukkan transparansi penggunaan anggaran terhadap publik, sehingga perlu adanya acuan sehingga data laporan keuangan dapat mudah terbaca. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Handayani, Rispanyo, and Sunarti 2020), yang juga menunjukkan dampak positif penerapan SAP terhadap Kualitas LKP. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah diatur PP 71 Tahun 2010, menurut (Aminy, Pituringsih, and Widiastuty 2021) menyatakan SAP didefinisikan sebagai pedoman akuntansi yang digunakan dalam merumuskan proses pembukuan dari input dan output penggunaan anggaran pemerintah sehingga dapat dipresentasikan sebagai laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut menekankan pentingnya implementasi SAP untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperbaiki pengukuran kinerja, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset. Penerapan SAP yang tepat dianggap sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas laporan keuangan yang meningkat akan memberikan dampak terhadap tercapainya kepuasan publik.

Pengujian kedua menunjukkan dampak positif dari penerapan Good Governance terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemda. Hasil ini memperkuat hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan good governance dalam sebuah instansi akan memberikan dampak terhadap output laporan yang menunjukkan penggunaan anggaran yang akan dihasilkan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Maulana, 2021) yang juga membuktikan adanya hubungan positif terkait good governance terhadap mutu output laporan keuangan yang dibuat. Menurut (Junyantara and Putra 2021) menyimpulkan bahwa peningkatan Good Governance di tingkat pemerintah daerah berkorelasi dengan peningkatan LKP sebagai bentuk laporan penggunaan anggaran dalam periode tersebut. Hal ini karena kesesuaian pembuatan laporan keuangan dengan prinsip good governance seperti kewajaran, akuntabel, transparansi, responsibility dan keadilan. Hubungan antara akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi dalam sebuah pembuatan laporan keuangan dapat dilihat sebagai suatu keterkaitan yang saling memperkuat. Akuntabilitas sebagai cerminan good governance untuk bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh pegawai, di mana sebuah tindakan atau kebijakan yang akuntabel harus mencerminkan tanggung jawab dan mematuhi SAP (Ubudiyah, 2018). Kemudian, responsibilitas akan mendorong pemangku jabatan akuntan untuk memenuhi kewajiban dan tugas yang telah

ditentukan, dan berperilaku sesuai dengan landasan nilai dan moral yang berlaku sehingga output laporan keuangan yang dibuat akan semakin berkualitas. Selanjutnya, Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi, laporan keuangan dapat diawasi dengan lebih baik oleh masyarakat sehingga output kualitas laporan keuangan akan meningkat. Fenomena ini terjadi karena ada tuntutan terhadap penyusunan laporan untuk lebih transparansi, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sehingga, setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pemahaman yang jelas atas wewenang yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan kewajiban dengan baik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pegawai khususnya sub bagian keuangan pemerintah daerah di banggai kepulauan sebagai sampel, dengan total responden sebanyak 70 orang. Pengelolaan data dilakukan menggunakan SPSS V.21 untuk mengolah data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Good Governance memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kedua variable ini terbukti berperan penting dalam menentukan kualitas pelaporan finansial di sektor public.

### DAFTAR PUSTAKA

- Advia, Raibbatol, Agus Satrya Wibowo, and M. Ichsan Diarsyad. 2023. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya)." *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan* 14(1): 1–10.
- Aminy, Roisatul, Endar Pituringsih, and Erna Widiastuty. 2021. "Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Valid: Jurnal Ilmiah* 18(2): 136–47.
- Asnawi Zikri. 2022. "Diduga Rugikan Negara Rp 29 Miliar, Mantan Kepala BPKAD Bangkep Jadi DPO Polda Sulteng Artikel Ini Telah Tayang Di TribunPalu.Com Dengan Judul Diduga Rugikan Negara Rp 29 Miliar, Mantan Kepala BPKAD Bangkep Jadi DPO Polda Sulteng, <https://Palu.Tribunnews.com>." *TribunPalu.com*. <https://palu.tribunnews.com/2022/02/04/rugikan-negara-rp-29-miliar-mantan-kepala-bpkad-bangkep-jadi-dpo-polda-sulteng>.
- Firmansyah, Amrie, Muhamad Rizal Yuniar, and Zef Arfiansyah. 2022. "Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 4(2): 181–97.

- Gustina, Ira et al. 2022. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir)." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8(3): 240–53.
- Handayani, Putri Nur, Rispantyo Rispantyo, and Sunarti Sunarti. 2020. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada OPD Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 16(3): 270–79.
- Jensen, Michael, and William Meckling. 1976. "THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE." *The Corporate Financiers* 3: 305–60.
- Junyantara, I Gede Agus, and I Putu Deddy Samtika Putra. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 338–58.
- Lantu, Fransiska Tirza, Royke Pangkey, and Olviane Sumampouw. 2023. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (32): 91–97.
- Maramis, Miranda Miryam, Jenny Morasa, and Heince R. N. Wokas. 2018. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(04): 563–70.
- Maulana M, Robi. 2021. "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2(1): 126–37.
- Munggaran, Ady Kurnia, Muhammad Yusuf, Magister Akuntansi, and Universitas Pancasila. 2020. "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEMPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AUDITOR INTERNALTERHADAPKUALITASLAPORANKEUANGANPEMERINTAH." 1(5).
- Philadelphiah, Istiqomah Shinta, Sri Suryaningsum, and Sriyono Sriyono. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 2(1): 17–35.
- Rahmah Muthia, 2018. 2018. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR." : 1–26.
- Ramadhan, Risky, and Uni Fahrani. 2024. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah

- Kabupaten Dompu).” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4(1): 229–47.
- Sari, fangela myas. 2022. “KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH ( Studi Empiris Pada Kabupaten Batang ).” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 3(1): 27–42.
- Utama, I Kadek Indra. 2021. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar.” *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 492–513.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, and Hafifah Nasution. 2020. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 15(2): 212–32.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

## TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean   | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| SAP                | 70 | 14      | 28      | 24,700 | 3,307          |
| GG                 | 70 | 12      | 24      | 20,528 | 3,067          |
| LKPD               | 70 | 14      | 28      | 24,014 | 3,685          |
| Valid N (listwise) | 70 |         |         |        |                |

(Sumber: Data diolah, 2024)

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

| Model                               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
|                                     | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| (Constant)                          | 2,438                       | 2,192      |                           | 1,112 | 0,27  |
| Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) | 0,622                       | 0,139      | 0,558                     | 4,469 | 0,000 |
| Good Governance (X2)                | 0,303                       | 0,15       | 0,252                     | 2,017 | 0,048 |

a. Dependent Variable: LKPD

(Sumber: Data diolah, 2024)